







Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk partai politik baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan partai politik baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi menyusun rancangan awal pembentukan partai politik dan menghasilkan lima rancangan, yaitu: pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, mabda' siyasi, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan naskah deklarasi. Sang inisiator pembentukan partai politik bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid merasa keberatan bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU, lantaran terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikap Gus Dur akhirnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran partai politik berbasis ahlusunah wal jamaah. Sikap Gus Dur ini diperkuat dengan dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah,



Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syuro*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.
3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan

dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

4. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang

memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.



7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyah*), kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.
8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (*insaniyah diniyah*), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna



Terbukti, ketokohan dan kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid dan Matori Abdul Djilil mampu mendongkrak suara partai pada pemilihan umum tahun 1999. Pada waktu itu Partai Kebangkitan Bangsa mampu meraih 13.336.982 suara dengan prosentase 12,61% serta mendapatkan 51 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat

Koalisi poros tengah reformasi pun menunjuk KH. Abdurrahman Wahid untuk maju sebagai calon presiden. Pada pemungutan suara sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, KH. Abdurrahman Wahid akhirnya terpilih menjadi presiden Republik Indonesia dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.

Sebagai partai politik yang memiliki massa yang besar, internal Partai Kebangkitan Bangsa sendiri juga tidak terlepas dari konflik. Perselisihan politik antara KH. Abdurrahman Wahid dan Matori Abdul Djilil sempat berujung pada pemecatan sepihak yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Matori Abdul Djilil sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Pada 15 Agustus 2001 Alwi Shihab menjadi pejabat sementara Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa . Selanjutnya secara resmi Alwi Shihab menjadi Ketua umum pada 17 Januari 2002 hingga 25 Mei 2005. Pada pemilihan umum tahun 2004, Partai Kebangkitan Bangsa menduduki peringkat ketiga setelah berhasil memperoleh 11.989.564 suara. Dengan jumlah itu Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 52 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada periode 25 Mei 2005 hingga 23 Juli 2010 , Muhaimin Iskandar resmi menjadi Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Pada periode ini konflik internal partai juga memanas yang ditandai dengan dualism kepengurusan partai. KH. Abdurrahman Wahid sebagai tokoh yang menjadi panutan bagi sebagian massa Partai Kebangkitan Bangsa kembali berseberangan kebijakan politik dengan Muhaimin Iskandar. Kondisi ini menyebabkan perolehan suara partai pada pemilihan umum

